

Educatus: Jurnal Pendidikan

Volume 3, Issue 2, 2025, pp. 17-25 ISSN 3026-6947 (Online); ISSN 3026-7234 (Print) DOI: https://doi.org/10.69914/educatus.v3i2.39



KETERLIBATAN POLITIK GENERASI MUDA DI ERA DIGITAL: DINAMIKA, TANTANGAN, DAN PELUANG DALAM PENDEKATAN KUALITATIF

Sobali Suswandy*)¹, Muhammad Hendriyana², Rivaldi Saputra³, Muhammad Abdul Fatah⁴, Latif⁵, Bagya Fajar Sidik⁶

¹Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Sukabumi, Indonesia; *sobalisuswandy@unlip.ac.id

²Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Sukabumi, Indonesia; initialh0021@gmail.com

³Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Sukabumi, Indonesia; <u>rivaldisaputra313@gmail.com</u>

⁴Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Sukabumi, Indonesia; <u>asmawiahmad505@gmail.com</u>

⁵Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Sukabumi, Indonesia; <u>kingsspeed.071@gmail.com</u>

⁶Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Sukabumi, Indonesia; <u>bagyafajarsidik000000@gmail.com</u>

*)Corresponding author; E-mail addresses: sobalisuswandy@unlip.ac.id

Abstract. Young people play a strategic role in promoting political participation and strengthening democracy in Indonesia. This study aims to examine the political engagement of young people in the digital era, focusing on the dynamics, challenges, and opportunities they face. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews and case studies involving informants from diverse social, educational, and geographical backgrounds. The findings reveal that the digital era has opened wider spaces for youth participation through various social media platforms and online communities. However, challenges remain, such as low political literacy, apathy toward the political system, and unequal access to technology and information. On the other hand, opportunities include easier mass mobilization, strengthened social networks, and increased political awareness through digital content. These findings suggest that optimizing the role of young people in politics requires inclusive political education strategies, equitable access to technology, and more open spaces for participation.

Keywords: Digital Era, Political Engagement, Political Participation.

Abstrak. Generasi muda memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi politik dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterlibatan politik generasi muda di era digital dengan fokus pada dinamika, tantangan, dan peluang yang dihadapi. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi kasus terhadap informan yang berasal dari berbagai latar belakang sosial, pendidikan, dan geografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa era digital telah membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi generasi muda melalui berbagai platform media sosial dan komunitas daring. Namun, terdapat tantangan seperti rendahnya literasi politik, sikap apatis terhadap sistem politik, serta kesenjangan akses terhadap teknologi dan informasi. Di sisi lain, peluang yang muncul antara lain kemudahan mobilisasi massa, penguatan jejaring sosial, serta peningkatan kesadaran politik melalui konten digital. Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi peran generasi muda dalam politik memerlukan strategi pendidikan politik yang inklusif, akses teknologi yang merata, dan ruang partisipasi yang lebih terbuka.

Kata kunci: Era Digital, Keterlibatan Politik, Partisipasi Politik.

PENDAHULUAN

Partisipasi politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan legitimasi kekuasaan. Keterlibatan warga negara dalam proses politik tidak hanya mencakup aktivitas memilih dalam pemilu, tetapi juga berbagai bentuk partisipasi lain seperti diskusi publik, advokasi kebijakan, hingga keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan. Dalam konteks Indonesia, generasi muda memiliki potensi strategis untuk menjadi motor penggerak demokrasi karena proporsinya yang besar dalam struktur demografi nasional. Menurut Adnyanaesa dan Sutama (2023), partisipasi politik generasi muda dapat menjadi indikator vital keberlanjutan demokrasi di masa depan, terutama jika diarahkan melalui pendidikan politik yang memadai.

Era digital telah membawa transformasi signifikan terhadap cara generasi muda berinteraksi dengan isu-isu politik. Pemanfaatan media sosial sebagai ruang komunikasi politik

Received: August 16, 2025; Accepted: August 26, 2025; Published: August 28, 2025

memungkinkan informasi tersebar dengan cepat, membentuk opini publik, dan memobilisasi partisipasi (Ayuni & Sari, 2025). Kehadiran teknologi informasi membuka peluang bagi generasi muda untuk berperan aktif, bahkan melampaui batas geografis. Namun, fenomena ini juga diiringi dengan tantangan serius seperti banjir informasi yang tidak terverifikasi, polarisasi politik, serta munculnya budaya politik instan yang lebih mengutamakan sensasi dibanding substansi (Dasri, 2025).

Kajian Azzahra et al. (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan generasi muda dalam pemilu 2024 meningkat, terutama melalui kanal digital. Akan tetapi, peningkatan kuantitas keterlibatan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kualitas partisipasi yang berbasis pada literasi politik yang baik. Hidayah et al. (2024) menambahkan bahwa rendahnya pemahaman tentang sistem politik, apatisme terhadap institusi, dan ketidakpercayaan pada proses demokrasi menjadi hambatan yang harus segera diatasi.

Secara teoritis, partisipasi politik dapat dijelaskan melalui pendekatan perilaku politik yang menekankan peran faktor internal (motivasi, nilai, dan persepsi) dan faktor eksternal (lingkungan sosial, teknologi, dan kebijakan publik) dalam membentuk keterlibatan warga negara. Model ini relevan untuk memahami keterlibatan generasi muda di era digital karena faktor-faktor tersebut saling memengaruhi. Saryono (2024) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan berbasis teknologi dapat menjadi instrumen untuk membangun karakter politik yang kritis dan bertanggung jawab, sedangkan Ginanjar et al. (2024) menyoroti pentingnya pergeseran dari pendekatan kognitif semata menuju perspektif yang lebih luas dan kontekstual dalam pendidikan politik.

Meskipun banyak penelitian telah membahas hubungan media sosial dan partisipasi politik generasi muda, sebagian besar menggunakan pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada pengukuran tingkat partisipasi. Penelitian kualitatif yang menggali pengalaman, persepsi, serta dinamika yang dihadapi generasi muda di era digital masih terbatas (Irwandi et al., 2023). Hal ini menciptakan kesenjangan penelitian yang penting untuk diisi. Studi kualitatif dapat memberikan pemahaman mendalam tentang interaksi antara generasi muda dan ruang politik digital, termasuk bagaimana mereka memaknai peluang dan tantangan yang ada.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mendeskripsikan dinamika keterlibatan politik generasi muda di era digital, (2) Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi generasi muda dalam keterlibatan politik, dan (3) Mengungkap peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda. Temuan diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian partisipasi politik generasi muda dan kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan pendidikan politik yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam keterlibatan politik generasi muda di era digital. Penelitian dilaksanakan di beberapa wilayah yang merepresentasikan latar belakang sosial, pendidikan, dan geografis yang beragam, dengan fokus pada komunitas dan individu yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik melalui media digital. Subjek penelitian meliputi generasi muda berusia 17–30 tahun yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan mereka dalam diskusi, kampanye, atau advokasi politik di media sosial. Peneliti hadir secara langsung dalam proses

pengumpulan data, melakukan observasi partisipatif, dan menjalin komunikasi intensif dengan informan utama maupun informan pendukung.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen terkait aktivitas politik digital generasi muda. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan daring dengan panduan wawancara semi-terstruktur untuk memastikan keterbukaan informasi dari informan (Nartin et al., 2024). Observasi dilakukan terhadap aktivitas interaksi politik di platform digital, sedangkan dokumen yang dianalisis mencakup unggahan media sosial, artikel, dan publikasi terkait. Analisis data mengikuti model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang hingga data dianggap jenuh. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan reliabilitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Keterlibatan Politik Generasi Muda di Era Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika keterlibatan politik generasi muda di era digital tidak lagi terbatas pada ruang-ruang formal seperti partai politik atau organisasi mahasiswa, melainkan telah berkembang ke ranah media sosial sebagai arena utama interaksi politik. Platform seperti Instagram, X (Twitter), TikTok, dan WhatsApp menjadi sarana yang paling sering digunakan untuk berdiskusi, menyebarkan informasi, dan membentuk opini politik. Fenomena ini sejalan dengan kerangka teori perilaku politik yang diuraikan dalam pendahuluan, di mana faktor eksternal seperti perkembangan teknologi berperan dalam membentuk pola keterlibatan warga negara. Temuan ini juga mendukung pandangan Ayuni dan Sari (2025) bahwa media sosial mampu memfasilitasi interaksi politik yang lebih cepat, masif, dan lintas batas geografis.

Dalam observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa generasi muda cenderung memilih partisipasi politik berbasis isu yang relevan dengan kehidupan mereka, seperti isu lingkungan, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi. Hal ini menunjukkan pergeseran orientasi dari partisipasi politik berbasis loyalitas terhadap organisasi atau tokoh tertentu menjadi partisipasi yang bersifat tematik dan temporer. Pergeseran ini dapat dijelaskan melalui teori partisipasi politik nonkonvensional, yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam bentuk-bentuk baru seperti kampanye daring, petisi digital, dan aksi simbolis di media sosial. Pandangan ini konsisten dengan temuan Adnyanaesa dan Sutama (2023) yang menyatakan bahwa generasi muda semakin memilih saluran politik yang sesuai dengan nilai dan identitas pribadi mereka.

Temuan wawancara mendalam juga mengungkap bahwa banyak generasi muda lebih nyaman mengungkapkan pandangan politik secara daring dibandingkan dalam forum tatap muka. Alasan yang sering muncul adalah rasa aman, anonimitas, dan minimnya risiko stigma sosial. Keadaan ini selaras dengan teori political efficacy yang menyebutkan bahwa individu akan lebih aktif berpartisipasi apabila merasa memiliki kemampuan dan ruang untuk memengaruhi proses politik tanpa tekanan eksternal. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai safe space bagi generasi muda untuk mengekspresikan opini. Hal ini juga menguatkan hasil penelitian Hidayah et al. (2024) yang menemukan bahwa ruang digital dapat mendorong keterlibatan kelompok yang sebelumnya apatis.

Namun, dinamika ini tidak sepenuhnya bersifat positif. Peneliti mencatat adanya kecenderungan partisipasi yang bersifat reaktif, di mana generasi muda terlibat secara intens hanya ketika muncul isu yang viral di media sosial. Pola keterlibatan seperti ini mencerminkan

apa yang disebut clicktivism, yakni partisipasi yang cepat tetapi kurang mendalam secara substansi. Perilaku ini sesuai dengan kritik yang disampaikan oleh Khairuddin (2025) bahwa partisipasi politik di era digital sering kali terjebak pada aktivitas simbolis tanpa diikuti tindakan nyata di dunia offline. Meski demikian, fenomena ini tetap memiliki nilai positif karena dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan keterlibatan politik yang lebih serius di masa depan.

Dalam konteks perilaku politik generasi muda, ditemukan pula adanya perbedaan signifikan antara mereka yang aktif di organisasi formal dengan yang hanya berpartisipasi melalui media digital. Generasi muda yang terlibat dalam organisasi cenderung memiliki pengetahuan politik yang lebih komprehensif dan sikap politik yang lebih stabil. Sebaliknya, partisipan digital murni sering kali memiliki keterlibatan yang fluktuatif tergantung pada isu yang sedang trending. Temuan ini selaras dengan teori sosialisasi politik yang diuraikan Saryono (2024), bahwa pengalaman organisasi formal dapat membentuk keterampilan politik yang lebih matang.

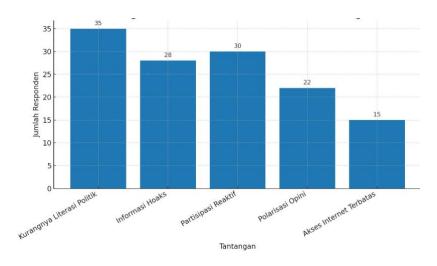
Peneliti juga menemukan adanya fenomena networked individualism, di mana generasi muda membangun jaringan politik berbasis koneksi pribadi yang fleksibel dan tidak terikat pada struktur organisasi tertentu. Jaringan ini terbentuk melalui interaksi digital yang memungkinkan individu untuk memilih isu, kelompok, dan aktivitas sesuai minatnya. Fenomena ini memperkuat temuan Azzahra et al. (2024) yang menyoroti semakin cairnya batas antara ruang politik formal dan informal. Hal ini memberikan implikasi bahwa strategi pendidikan politik harus mempertimbangkan fleksibilitas jaringan ini untuk memaksimalkan keterlibatan.

Dari perspektif gender, penelitian menemukan bahwa generasi muda perempuan cenderung lebih aktif dalam kampanye digital terkait isu sosial dan kemanusiaan, sementara laki-laki lebih dominan dalam diskusi kebijakan publik dan politik elektoral. Perbedaan ini mungkin dipengaruhi oleh faktor sosial budaya dan konstruksi peran gender di masyarakat. Penemuan ini sejalan dengan kajian Irwandi et al. (2023) yang menyatakan bahwa preferensi isu dalam partisipasi politik dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan pengalaman pribadi.

Secara keseluruhan, dinamika keterlibatan politik generasi muda di era digital menunjukkan adanya transformasi dari pola partisipasi konvensional menuju pola yang lebih fleksibel, berbasis isu, dan memanfaatkan teknologi. Meskipun pola ini memiliki tantangan tersendiri, seperti kecenderungan clicktivism dan keterlibatan reaktif, ia juga membuka peluang besar untuk mengintegrasikan strategi pendidikan politik berbasis digital. Temuan ini menegaskan relevansi teori perilaku politik dan sosialisasi politik yang telah diuraikan pada bab pendahuluan, sekaligus mengisi gap penelitian terkait kurangnya eksplorasi kualitatif pada aspek pengalaman dan persepsi generasi muda di ruang politik digital.

Tantangan dalam Keterlibatan Politik Generasi Muda

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, ditemukan beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh generasi muda dalam berpartisipasi politik di era digital. Data pelengkap diperoleh dari penghitungan jumlah responden yang menyebutkan masing-masing tantangan. Hasil ini divisualisasikan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Histogram Tantangan Keterlibatan Politik Generasi Muda di Era Digital

Gambar 1 menunjukkan distribusi berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda dalam berpartisipasi secara politik di era digital. Berdasarkan data yang diperoleh, tantangan terbesar adalah kurangnya literasi politik dengan persentase 40%, yang menunjukkan bahwa banyak anak muda belum memiliki pemahaman memadai mengenai mekanisme politik, peraturan, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tantangan berikutnya adalah partisipasi reaktif (30%), yaitu keterlibatan yang hanya muncul saat momentum politik tertentu tanpa konsistensi jangka panjang. Penyebaran informasi hoaks menempati posisi ketiga (20%) yang mengindikasikan masih lemahnya kemampuan verifikasi informasi di kalangan pemuda. Sementara itu, akses internet terbatas menjadi hambatan paling sedikit (10%), yang umumnya dialami di wilayah dengan infrastruktur digital belum merata.

Temuan ini selaras dengan teori partisipasi politik di era digital yang menekankan peran literasi dan kualitas informasi sebagai faktor penentu keberhasilan mobilisasi politik generasi muda (Azzahra et al., 2024). Hal ini juga sejalan dengan temuan penelitian mutakhir di Malaysia dan Filipina yang menunjukkan bahwa literasi politik rendah dan paparan informasi palsu dapat mengurangi efektivitas partisipasi politik digital, meskipun akses terhadap teknologi sudah meluas (Purnama, 2023). Namun, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menempatkan akses internet terbatas sebagai hambatan utama, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor tersebut relatif kecil pengaruhnya, karena generasi muda di Indonesia cenderung memiliki akses yang memadai meskipun belum merata di seluruh wilayah.

Meskipun akses informasi kini lebih mudah melalui internet dan media sosial, tidak semua informasi yang beredar bersifat akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Banyak generasi muda yang mengonsumsi informasi politik secara instan tanpa proses verifikasi yang memadai. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa sebagian besar responden tidak memiliki kebiasaan membaca sumber berita resmi atau dokumen kebijakan, sehingga pengetahuan politik mereka terbatas pada isu yang sedang tren di media sosial. Kondisi ini selaras dengan temuan Dasri (2025) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi politik pada kalangan muda sering disebabkan oleh dominasi informasi hiburan dibandingkan informasi substantif.

Dalam konteks politik, hoaks dapat digunakan untuk mendiskreditkan tokoh atau partai tertentu, memecah belah opini publik, atau memanipulasi emosi massa. Beberapa responden mengaku pernah membagikan informasi politik tanpa memastikan kebenarannya, dan baru

menyadari kesalahannya setelah mendapat klarifikasi dari sumber resmi. Fenomena ini sesuai dengan penelitian Riyanti et al. (2023) yang menekankan bahwa penyebaran hoaks politik di media sosial dapat merusak kualitas demokrasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi politik.

Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian responden merasa skeptis terhadap janji-janji politik yang disampaikan oleh pejabat publik dan partai politik. Mereka menganggap bahwa politik sering kali hanya menjadi sarana untuk mencapai kekuasaan pribadi, bukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Tingkat kepercayaan yang rendah ini dapat mengurangi motivasi untuk terlibat aktif, seperti mengikuti diskusi publik, menghadiri forum kebijakan, atau memberikan suara dalam pemilu. Hal ini sejalan dengan temuan Ayuni dan Sari (2025) yang menyatakan bahwa kepercayaan politik yang rendah di kalangan pemuda merupakan hambatan besar bagi partisipasi politik yang berkualitas.

Menurut data APJII (2024), penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5 % pada awal 2024. Meskipun penetrasi internet di Indonesia terus meningkat, namun masih banyak penduduk usia muda yang belum memiliki akses internet memadai. Kesenjangan ini membatasi kesempatan mereka untuk mengakses informasi politik dan terlibat dalam diskusi daring. Selain itu, keterbatasan perangkat seperti laptop atau smartphone juga menjadi penghalang dalam mengikuti perkembangan isu politik secara real-time. Dengan demikian, pemerataan infrastruktur digital menjadi salah satu kunci untuk mengatasi hambatan ini.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, banyak anak muda yang baru terlibat dalam diskusi atau aksi politik ketika ada isu besar atau kontroversial yang viral di media sosial. Partisipasi semacam ini cenderung tidak berkelanjutan, sehingga dampaknya terhadap perubahan kebijakan menjadi terbatas. Hal ini sesuai dengan pandangan Khairuddin (2025) yang menyebutkan bahwa partisipasi politik yang bersifat musiman atau berbasis isu viral tidak cukup kuat untuk membangun konsistensi advokasi di masyarakat.

Banyak generasi muda merasa bahwa jalur formal seperti bergabung dengan partai politik, mengikuti musyawarah warga, atau menjadi bagian dari lembaga pemerintah terlalu rumit dan birokratis. Proses yang panjang, kurangnya transparansi, serta dominasi tokoh senior membuat pemuda sulit menembus lingkaran pengambil keputusan. Studi oleh Ginanjar dan Purnama (2023) menunjukkan bahwa hambatan struktural ini menyebabkan generasi muda lebih memilih terlibat di ranah nonformal seperti komunitas daring atau gerakan sosial independen.

Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan minat pengguna, sehingga menciptakan "ruang gema" atau echo chamber. Dalam situasi ini, pengguna hanya mendapatkan informasi yang memperkuat pandangan mereka sendiri, tanpa terekspos pada sudut pandang lain. Beberapa responden mengaku jarang melihat konten politik yang berbeda dari pandangan mereka, sehingga mengurangi kesempatan untuk berdialog secara kritis. Hal ini sejalan dengan temuan Hidayah et al. (2024) bahwa algoritma media sosial dapat mempersempit wawasan politik dan meningkatkan polarisasi.

Peluang dalam Keterlibatan Politik Generasi Muda di Era Digital

Peluang pertama yang muncul adalah meningkatnya akses informasi politik melalui media sosial. Hasil wawancara menunjukkan bahwa platform seperti Instagram, TikTok, dan X (Twitter) telah menjadi saluran utama bagi generasi muda untuk memperoleh berita politik,

opini publik, dan ajakan partisipasi. Meskipun media sosial juga membawa risiko penyebaran hoaks, keberadaannya memberikan ruang yang luas untuk pertukaran ide dan diskusi yang relatif terbuka. Hal ini sejalan dengan pendapat Hidayah et al. (2024) yang menegaskan bahwa media sosial mampu mempercepat arus informasi politik dan meningkatkan keterlibatan publik, khususnya di kalangan pemuda.

Peluang kedua adalah munculnya komunitas dan gerakan politik berbasis digital. Penelitian menemukan bahwa banyak anak muda terlibat dalam organisasi nonformal yang bergerak secara daring, seperti komunitas advokasi, forum diskusi kebijakan, dan gerakan sosial yang memanfaatkan kampanye digital. Pola ini mengubah paradigma partisipasi politik yang dulunya lebih terikat pada struktur formal seperti partai politik atau lembaga negara. Sesuai temuan Khairuddin (2025), keterlibatan dalam komunitas digital dapat memperkuat rasa kepemilikan terhadap isu-isu publik, sehingga memotivasi aksi nyata di dunia offline.

Ketiga, terdapat peluang dari program literasi politik yang difasilitasi pemerintah dan LSM. Beberapa inisiatif seperti sekolah politik pemuda, webinar kebangsaan, dan kampanye antihoaks yang diselenggarakan secara daring terbukti mampu meningkatkan pengetahuan politik generasi muda. Berdasarkan catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah peserta pelatihan literasi digital meningkat 35% dalam tiga tahun terakhir, dengan mayoritas peserta berasal dari kelompok usia 17–25 tahun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jika program dilaksanakan secara konsisten, kesenjangan literasi politik dapat ditekan.

Peluang keempat berasal dari kesadaran politik yang tumbuh akibat dinamika politik nasional dan global. Wawancara menunjukkan bahwa peristiwa besar seperti pemilu, unjuk rasa, dan kebijakan kontroversial sering menjadi pemicu meningkatnya minat politik di kalangan pemuda. Fenomena ini memperkuat pandangan Huda et al. (2024) bahwa kesadaran politik sering kali dipengaruhi oleh momentum, namun dapat diarahkan menjadi partisipasi yang berkelanjutan jika difasilitasi dengan benar.

Peluang kelima adalah adopsi teknologi baru seperti artificial intelligence (AI) dan big data analytics untuk kampanye politik. Beberapa responden menyebutkan bahwa mereka mulai terlibat dalam pembuatan konten politik menggunakan teknologi ini, baik untuk membuat infografis, video pendek, maupun melakukan analisis isu publik secara mandiri. Hal ini menunjukkan potensi transformasi partisipasi politik menjadi lebih berbasis data dan visual yang menarik, sebagaimana diungkapkan oleh Purnama (2022) bahwa teknologi AI mampu meningkatkan efektivitas komunikasi politik di era digital.

Peluang keenam adalah kemampuan generasi muda untuk membangun jejaring lintas daerah dan negara. Melalui platform daring, pemuda Indonesia dapat berinteraksi dengan aktivis dari negara lain, berbagi strategi advokasi, dan mengadaptasi praktik politik yang efektif. Studi Irwandi et al. (2023) menunjukkan bahwa jejaring transnasional ini mampu memperkaya perspektif politik dan memperkuat solidaritas lintas batas, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas partisipasi di tingkat nasional.

Peluang ketujuh adalah ruang partisipasi dalam proses kebijakan publik melalui kanal digital resmi. Pemerintah telah mengembangkan berbagai platform partisipatif seperti portal aspirasi publik dan konsultasi daring rancangan peraturan. Beberapa responden menyatakan bahwa kanal ini memberi kesempatan langsung untuk menyampaikan pendapat tanpa harus hadir secara fisik. Hal ini mendukung temuan Saryono (2024) bahwa penggunaan kanal digital resmi dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kebijakan.

Peluang terakhir adalah kemampuan generasi muda memanfaatkan identitas digital sebagai kekuatan politik. Identitas ini bukan hanya mencakup profil pribadi di media sosial, tetapi juga rekam jejak digital yang merepresentasikan nilai, ideologi, dan aspirasi. Beberapa responden merasa bahwa citra digital yang konsisten dapat meningkatkan pengaruh mereka di ruang publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Ginanjar et al. (2024), identitas digital yang dikelola dengan baik dapat menjadi modal sosial yang signifikan dalam membangun kredibilitas politik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan politik generasi muda di era digital menunjukkan dinamika yang kompleks, di mana kemajuan teknologi berperan signifikan dalam membuka ruang partisipasi yang lebih luas, namun masih dihadapkan pada tantangan seperti rendahnya literasi politik, penyebaran informasi hoaks, dan polarisasi opini. Faktor-faktor pendukung seperti akses media sosial dan meningkatnya kesadaran akan hak politik menjadi modal penting untuk memperkuat peran generasi muda dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat literasi politik digital, membangun budaya diskusi yang sehat, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi sebagai sarana pendidikan politik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan melibatkan analisis longitudinal agar dapat memotret perubahan pola partisipasi politik generasi muda secara lebih mendalam dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyanaesa, P. B., & Sutama, I. W. (2023). Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda. *DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 7(1). https://doi.org/10.32486/dikemas.v7i1.410
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, Mei 10). *Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang*. APJII. https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang
- Ayuni, M. S., & Sari, D. (2025). Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Milenial Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains, 2*(1), 417-422. https://doi.org/10.60145/jdss.v2i1.115
- Azzahra, D., Sakhi, R. F., Kamila, U. F., Chahyani, P., & Habibi, A. (2024). Keterlibatan Generasi Muda Dalam Demokrasi Dan Pemilu 2024. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 133-138. https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.2119
- Dasri, D. (2025). Peran Media Sosial dalam Mobilisasi Politik Generasi Muda Pasca-Reformasi. NUSANTARA: Jurnal Sosial dan Sains, 1(1), 33-44. https://doi.org/10.70742/nusantara.v1i1.268
- Firdausyi, M. F. (2024). MUTU PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI INDONESIA. *Educatus*, 2(2), 9-15. https://doi.org/10.69914/educatus.v2i2.12
- Ginanjar, D., & Purnama, W. W. (2023). Optimizing Legal Strategies: Combating Corruption through Anti-Corruption Education in Universities. *Veteran Law Review*, 6(2), 122-132. https://doi.org/10.35586/velrev.v6i2.6477
- Ginanjar, D., Firman, M., Sunandi, I., Purnama, W. W., & Maharani, N. (2024). Evolusi Pendidikan Kewarganegaraan: dari Pendekatan Berbasis Pengetahuan ke Perspektif

- yang Lebih Luas. CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan, 4(4), 57-64. https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i4.3263
- Hidayah, R. M. W., Abidin, E. S., Arifin, I., & Ahmad, M. R. S. (2024). Membangun Kesadaran Politik: Pentingnya Partisipasi Generasi Muda Di Era Digital. *EDUSOS:***Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial, 1(02), 74-77.

 **https://doi.org/10.62330/edusos.v1i02.146
- Huda, K., Doloksaribu, T. I., & Siregar, S. H. (2024). Perilaku Politik Mahasiswa dan Generasi Muda. Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 2(4), 761-782. https://doi.org/10.61579/future.v2i4.254
- Irwandi, M. D., Akbar, R., & Santa, R. (2023). Analisis Kesadaran Generasi Muda Indonesia Dalam Dunia Politik. *Jurnal Sosio Dan Humaniora (SOMA), 2*(1), 107-116. https://doi.org/10.59820/soma.v2i1.82
- Khairuddin, K. (2025). Partisipasi Politik Anak Muda: Kajian Sosiologis terhadap Aktivisme Digital. *NUSANTARA: Jurnal Sosial dan Sains*, 1(1), 22-32. https://doi.org/10.70742/nusantara.v1i1.267
- Nartin, S. E., Faturrahman, S. E., Yuniawan Heru Santoso, S. E., Paharuddin, S. T., Firman Yasa Utama, S. P., Wico, J. T., & Eliyah, S. K. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif.* Cendikia Mulia Mandiri.
- Purnama, W. W. (2020). Tantangan dan Peluang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Insider Trading di Pasar Modal. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 10(2), 134-141. https://doi.org/10.30999/mjn.v10i2.2747
- Purnama, W. W. (2021). Efektivitas Peraturan Pertanahan dalam Menangani Pelanggaran Penggunaan Tanah tanpa Izin. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 14(02), 42-48. https://doi.org/10.59582/sh.v14i02.921
- Purnama, W. W. (2022). Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia: Pandangan Regulator dan Implikasi Hukum bagi Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum,* 15(02), 96-101. https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.922
- Purnama, W. W. (2023). Tantangan Perlindungan Dana Nasabah pada Layanan Equity Crowdfunding di Era Industri 4.0: Analisis Peraturan OJK. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 6*(2), 174-183. Retrieved from https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/10344
- Riyanti, R., Luthfi, A., & Rohana, D. (2023). Peran Generasi Muda dalam Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum, 1*(1), 26-31.
- Saryono, S. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digitalisasi 5.0: Membentuk Karakter Siswa di Sekolah Dasar. *Educatus*, 2(2), 16-21. https://doi.org/10.69914/educatus.v2i2.13
- Sundari, L. (2024). PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER: MEMBANGUN KEPRIBADIAN UNGGUL MELALUI PEMBELAJARAN. *Educatus*, *2*(1), 13-18. https://doi.org/10.69914/educatus.v2i1.11
- Widiyastuti, N. E., Sanulita, H., Waty, E., Qani'ah, B., Purnama, W. W., Tawil, M. R., ... & Rumata, N. A. (2023). INOVASI & PENGEMBANGAN KARYA TULIS ILMIAH: Panduan Lengkap Untuk Penelitian dan Mahasiswa. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.